

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang anti dengan aksi kekerasan dan penindasan seperti penjajahan. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipaparkan mengenai pernyataan bangsa Indonesia yang anti dengan adanya penjajahan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online, arti kata dari “penjajahan”, penjajahan adalah suatu proses atau cara, sementara arti kata dari jajah adalah menguasai dan memerintah suatu negeri atau daerah.¹ Setiap hal yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan seperti aksi kekerasan serta penindasan secara sadar ditentang oleh Indonesia, karena Indonesia telah mengalami sendiri pengalaman menjadi bangsa yang dijajah dan untuk terlepas dari penderitaan yang dialami selama dijajah oleh bangsa lain, Indonesia telah melalui perjuangan yang tidak mudah. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan politik luar negeri republik Indonesia. Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan blok-blok kekuatan di dunia ataupun persekutuan militer, serta bangsa Indonesia juga berhak menentukan sendiri sikap menghadapi masalah-masalah yang ada. Aktif berarti Indonesia turut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan, membantu menyelesaikan permasalahan internasional, menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial

¹ *Arti Kata Jajah*. (2017). Retrieved Oktober 30, 2017, from Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id>

di dunia serta aktif membantu meredakan ketegangan yang sedang terjadi di dunia.²

Pada dasarnya, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip dasar terkait pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama yang berbunyi, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, dari kutipan tersebut menjelaskan ciri utama dari politik luar negeri Indonesia yaitu Indonesia merupakan negara yang anti dengan penjajahan, dan menjunjung tinggi perikemanusiaan dan keadilan. Politik luar negeri Indonesia juga berpedoman pada alinea keempat yang berbunyi, “....dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..”, dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menganut paham bebas dan aktif.

Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif telah diadopsi sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Prinsip bebas-aktif sering digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Demi terwujudnya politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia juga mulai tergabung ke dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, OKI, dan Organisasi Internasional lainnya.

Permasalahan yang terjadi di Myanmar menyangkut komunitas muslim yang menjadi korban atas pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi di Rakhine. Konflik di Rakhine Myanmar pada tahun 2012 merupakan konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingnya dimana etnis

² Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, hlm.17.

Rohingnya termasuk golongan minoritas muslim yang menetap di Myanmar. Etnis Rohingya menjadi pihak yang dirugikan ataupun korban dari konflik ini. Berbagai pelanggaran HAM seperti kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan serta tidak mendapatkan hak kewarganegaraan yang berpengaruh pada sulitnya mendapatkan pekerjaan dan akses publik atau fasilitas umum.³ Tidak hanya pelanggaran HAM, namun juga memunculkan adanya gelombang pengungsi yang mencari tempat perlindungan di negara tetangga seperti negara Bangladesh.

Meletusnya permasalahan yang terjadi di Rakhine Myanmar membuat negara Indonesia ikut turun tangan dalam membantu mencari solusi penyelesaian. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang mencakup mayoritas komunitas muslim, dan sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas-aktif yang anti penjajahan dan penindasan berusaha untuk meredakan serta membantu penyelesaian masalah kemanusiaan yang menimpa komunitas muslim di Rakhine Myanmar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

“Bagaimana upaya Indonesia dalam membantu mengatasi tragedi kemanusiaan di wilayah negara bagian Rakhine, Myanmar?”

³ Dewinta, R. T. (2016). Peran Organissi Kerjasama Islam (OKI). *Journal of International Relations*, hlm.127-128.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan Teori Politik Luar Negeri. Teori tersebut diharapkan dapat membantu menjawab permasalahan yang dikaji.

Teori Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri merupakan rangkaian kebijakan otoritatif dari suatu negara terhadap negara lain, dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Politik Luar negeri menggambarkan suatu tindakan negara yang mengarah pada situasi tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi, ruang dan waktu, baik itu dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun kondisi internasional. Politik luar negeri adalah strategi yang dirumuskan oleh para elit politik suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain untuk memperoleh, memperjuangkan, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya, baik itu melalui jalan diplomasi maupun perang.⁴

Jalan diplomasi dijadikan sebagai sebuah instrumen atau alat yang penting untuk mencapai kepentingan sebuah negara. Menurut penjelasan dari *Dinh*, diplomasi dianalogikan sebagai sebuah taktik sementara politik luar negeri sebagai strateginya. Dapat dikatakan bahwa politik luar negeri menggunakan diplomasi sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan dari kepentingan nasional suatu negara, dan juga dapat menciptakan kebijakan-kebijakan terkait kepentingan negara dalam ranah internasional. Oleh karena itu, diplomasi menjadi bagian penting dalam keberhasilan politik luar negeri suatu negara. Diplomasi menjadi sebuah alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tanpa adanya

⁴ Wuryandari, G. (2008). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 17-18.

tindak kekereasan atau perang. Menurut *Peter Marshall*, Diplomasi memiliki pengertian sebagai pelaksana politik luar negeri, dan *Adam Watson* mengemukakan bahwa diplomasi merupakan media atau pelaksana hubungan internasional yang dijalankan melalui negosiasi. Maka dari itu, politik luar negeri suatu negara berhasil atau tidaknya dalam menangani permasalahan ditentukan oleh seberapa kuat dan menyakinkannya diplomasi yang dilakukan oleh negara tersebut, karena diplomasi dalam konteks ini dijadikan sebagai alat atau media penghubung dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara dalam menjalankan politik luar negerinya.

Menurut *Jack C. Plano* dan *Roy Olton*, Politik luar negeri dikemukakan sebagai :

“Foreign policy is strategy or planed course of action developed by decision makers of state or international entities aimed, at achieving specific goals defined in term of national interest”.⁵

Dari pemaparan diatas, *Jack C. Plano* dan *Roy Olton* menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri merupakan suatu strategi atau tindakan terencana yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik international lainnya, dimana di kendalikan untuk mengarah ke tujuan spesifik bagi kepentingan nasional negara.

Jack C. Plano dan *Roy Olton* berpendapat bahwa setiap politik luar negeri dirancang untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional yang akan dicapai melalui politik luar negeri merupakan formalitas konkret dan dirancang dengan menghubungkan dan

⁵ C. Plano, J., & Olton, R. (1969). *The International Relaton Dictionary*. New York: Holt, Rinehart and Wiston.

mengaitkan dengan situasi ataupun keadaan di lingkungan internasional yang sedang berlangsung serta power (kekuasaan) yang dimiliki oleh suatu negara.⁶

Menurut *K. J. Holsti*, Politik Luar Negeri dikemukakan sebagai :

“ Foreign policy also incorporates ideas that are planned by policy makers in order to solve a problem or uphold some changes in the environment, which can be in the forms of policies, attitudes, or actions of another states or states.”

Dari pemaparan diatas, *K. J. Holtsi* menjelaskan bahwa politik luar negeri merupakan sebuah tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan dengan menggabungkan beberapa gagasan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang outputnya berupa kebijakan, sikap, ataupun tindakan.

Politik Luar Negeri adalah suatu sikap dan komitmen mutu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai diluar batas wilayahnya, dan itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijaksanaan politik luar negeri suatu bangsa. Bagi para aktor pengambil keputusan dan kebijaksanaan politik luar negeri suatu bangsa akan mempertimbangkan faktor-faktor berpengaruh terhadap formulasi kebijaksanaan politik luar negerinya. *K. J. Holtsi* berpendapat bahwa kebijakan, sikap atau tindakan suatu negara merupakan output dari politik luar negeri yang berlandaskan pemikiran dan pola tindakan yang disusun para pembuat keputusan yang bertujuan untuk : menanggulangi permasalahan dan mengusahakan perubahan di lingkungan internasional.

⁶ C. Plano, J., & Olton, R. (1999). *Kamus Hubungan Interasional*. Bandung: Abardin.hlm. 06

K. J. Holtsi membagi 3 kriteria dalam mengklasifikasikan tujuan dari politik luar negeri, yaitu :

- 1) Nilai (*values*), yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
- 2) Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan kata terdapat tujuan jangka pendek (*short term*); jangka menengah (*middle term*); dan jangka panjang (*long term*).
- 3) Tipe tuntutan yang diajukan oleh negara kepada negara lain.⁷

K. J. Holtsi juga memaparkan bahwa output dari politik luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan yaitu dalam kebijakan, sikap maupun tindakan negara lain.

Indonesia merupakan negara yang menganut politik luar negeri “bebas dan aktif”. “Bebas” yang berarti Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan di dunia yaitu blok barat dan blok timur. Sementara, “Aktif” berarti Indonesia turut aktif dalam menciptakan atau menjaga perdamaian dunia dan aktif dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional maupun meredakan ketegangan yang sedang terjadi di dunia. Paham “bebas – aktif “ yang di gunakan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dicetuskan pertama kali oleh Mohammad Hatta, dimana paham tersebut menunjukkan arti dari kepentingan nasional Indonesia yang diwujudkan melalui jalan diplomasi.

Diplomasi menjadi sebuah alat atau media penghubung dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia

⁷ Russet, B., & Star, H. (1988). *Worlds Politics: The Menu for Choice*. New York: W.H. Freeman and Co. Hl. 190 - 193

demikian mencapai kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri, diplomasi, dan kepentingan nasional menjadi 3 kunci penting dan saling berkaitan erat. Menurut *Hans J. Morgenthau*, diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara harus dapat menentukan apa yang menjadi tujuan negaranya, dan juga diplomasi tersebut harus juga mengerti tujuan dari negara lain, yang mana negara yang melakukan diplomasi harus menjadikan kedua tujuan negara yang berbeda tersebut kompatibel satu sama lainnya demi tercapainya keberhasilan dari diplomasi. Dalam politik luar negeri, diplomasi digunakan sebagai media atau alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti konflik tanpa adanya kekerasan hingga perang dalam penyelesaiannya.

Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berlandaskan pada UUD 1945, arah politik Indonesia menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, dan meningkatkan kemandirian bangsa serta kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, pemerintah Indonesia selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945.⁸ Arah kebijakan dari politik luar negeri Indonesia, seperti :

- 1) Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional termasuk penyelesaian masalah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia yang menetap di luar negeri.
- 2) Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerja sama internasional dan regional, baik bilateral maupun multilateral, dan perdamaian dalam politik serta hubungan internasional.

⁸ Yani, Y. M. (2016). *Persektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praktis*. UNPAD Repository, hlm.11.

- 3) Meningkatnya dukungan dan peran masyarakat internasional serta tercapainya tujuan pembangunan nasional.
- 4) Meningkatnya koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri sesuai dengan undang-undang.⁹

D. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil dugaan bahwa upaya Indonesia dalam membantu menyelesaikan permasalahan di Rakhine Myanmar yaitu melalui beberapa perjuangan. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dimana ditujukan untuk aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia menempuh jalan diplomasi. Melalui diplomasi, Indonesia berusaha untuk membantu dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Rakhine Myanmar. Indonesia berusaha untuk mengoptimalkan perannya untuk membantu baik itu korban dari tragedi kemanusiaan di Rakhine maupun pihak yang dirugikan.

E. Metodologi Penelitian

Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode *content analysis* dan *historical*. Dengan menggunakan metode *content analysis*, dalam menyusun penelitian ini data-data yang diperoleh berasal dari kumpulan dokumen maupun jurnal yang memuat mengenai

⁹ Yani, Y. M. (2016). Persektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praktis. *UNPAD Repository*, hlm. 12 - 13.

langkah-langkah Indonesia dalam memberi bantuan terhadap korban konflik maupun membantu penyelesaian konflik di Rakhine Myanmar, serta pernyataan-pernyataan dari pihak Indonesia mengenai permasalahan yang terjadi di Rakhine Myanmar. Jangkauan data yaitu mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Berdasarkan data-data yang terkumpul lalu dianalisa kesesuaiannya dengan fakta-fakta yang terjadi kemudian disimpulkan dan dijadikan sebagai data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Selain menggunakan metode *content analysis*, penelitian ini juga menggunakan metode *historical* yaitu dengan menganalisa data-datanya berdasarkan catatan sejarah yang ada. Mengenai dinamika politik luar negeri Indonesia dan peran Indonesia dalam menangani kasus-kasus atau permasalahan lain yang menyangkut komunitas muslim dunia. Diketahui bahwa politik luar negeri Indonesia memiliki paham bebas-aktif, dimana dalam pelaksanaannya tidak memihak ataupun bearhak menentukan sendiri sikap menghadapi masalah-masalah yang ada, serta Indonesia turut aktif dalam menjaga perdamaian dunia maupun meredakan permasalahan yang sedang terjadi.

Tingkat Analisa

Dalam penelitian ini, menerapkan tingkat analisa berupa pendekatan sistematis atau *induksionis* dimana diterapkan untuk memahami tingkah laku politik luar negeri Indonesia pada kurun waktu 2012-2017 dimana Indonesia sebagai negara yang memulai aksi kepeduliannya untuk membantu para korban konflik dan membantu mengatasi permasalahan di Rakhine Myanmar.¹⁰ Unit analisisnya yaitu negara dimana Indonesia sebagai aktor atau negara yang melakukan politik luar negeri dan Indonesia juga negara yang mengeluarkan aksinya dalam membantu para korban konflik dan kekerasan di Rakhine. Sementara unit eksplanasinya

¹⁰ Mas'oed, M. (1994). *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. Hlm. 12 - 13

berupa kelompok dimana etnis Rohingnya dan etnis Rakhine yang terlibat dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine Myanmar. Etnis Rohingnya menjadi pihak yang dirugikan paling banyak terkait permasalahan yang terjadi di Rakhine Myanmar.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini direncanakan terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab akan saling berkaitan dengan bab-bab lainnya.

Pada Bab I (satu) membahas mengenai bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Teori atau Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II (dua) membahas mengenai Dinamika Politik Luar Negeri Republik Indonesia.

Pada Bab III (tiga) membahas mengenai Permasalahan Kemanusiaan yang dihadapi oleh Komunitas Muslim Rohingnya di Rakhine Myanmar.

Pada Bab IV (empat) membahas mengenai Upaya Indonesia untuk membantu mengatasi permasalahan di Rakhine Myanmar.

Pada Bab V (lima) membahas mengenai penutup yang berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah dijelaskan atau dibahas pada bab-bab sebelumnya.